

Melongok Tingkat Kemiskinan di PNPM PISEW

Edhi Budiharso (CMAC)

Salah satu tujuan program PNPM PISEW adalah mengentaskan penduduk miskin di perdesaan disamping untuk mengatasi kesenjangan wilayah dan penyediaan lapangan kerja.

Secara umum, kemiskinan biasa didefinisikan sebagai kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Definisi ini mengandung dua kata kunci, yaitu keterbatasan kemampuan dan hidup secara layak. Bentuk keterbatasan kemampuan sangat bervariasi, dan antara lain dapat berupa keterbatasan keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi dan keterbatasan informasi. Sedangkan ukuran hidup secara layak akan sangat bervariasi tergantung pada norma dan kesepakatan sosial.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan masalah sosial. Masyarakat miskin, atau dapat disebut tidak punya, memiliki kemampuan yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kesulitan tersebut mengakibatkan kondisi fisik dan kesehatan yang buruk serta produktivitas kerja yang rendah. Selain itu, kemiskinan menyebabkan adanya disparitas golongan manusia antara yang punya dan yang tidak punya. Hal ini menyebabkan dapat terjadinya

kecemburuan social, bahkan sampai tindakan criminal.

Kemiskinan yang terdapat di daerah tidak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa kemungkinan penyebab kemiskinan terjadi. Berikut adalah kemungkinan penyebab kemiskinan:

- penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
- penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
- penyebab sub-budaya ("subcultural"), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
- penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
- penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Setiap wilayah berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa upaya pengurangan kemiskinan yang pada umumnya dilakukan oleh pemerintah, yakni:

- Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
- Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman,

pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.

- Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak [negara sejahtera](#) menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan [perawatan kesehatan](#).

Terdapat banyak kategori kemiskinan yang ada. Batas tingkat kemiskinan yang ada juga bervariasi. Standar yang berbeda-beda ini menjadikan jumlah masyarakat miskin dari satu tempat dengan tempat lain berbeda-beda pula. Berikut adalah beberapa pendekatan yang pada umumnya digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan suatu wilayah:

- **Pendekatan Pemenuhan Kalori (Sayogya 1977)**

Penetapan masyarakat miskin ditinjau dari total kebutuhan minimum makanan yaitu terpenuhinya 1.900 kalori dan 40 gram protein per hari atau disamakan dengan konsumsi beras per kapita per tahun. Di pedesaan bilamana pendapatan lebih tinggi atau sama dengan ekuivalensi 320 kg beras dikategorikan tidak miskin.

Klasifikasi miskin adalah sebagai berikut:

1. Melarat (*maverty level*), bila pendapatan per kapita dari 180 kg beras/tahun
2. Miskin sekali (*very poor*), bila pendapatan per ekivalen 180-240 kg beras/ tahun
3. Miskin (*poor*), bila pendapatan ekivalen 240-320 kg beras/tahun

4. Agak miskin (*moderate*), bila pendapatan per kapita sama atau lebih dari 320 kg beras/tahun.

Pada tahun 2009, harga beras rata-rata Rp 6.000/kg, maka garis kemiskinan diperkirakan dengan pendapatan Rp 6.000 x 320 = Rp 1.920.000/ tahun atau Rp 160.000/bulan atau Rp 6.400/hari

- **Pendekatan Bank Dunia**

Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu [kemiskinan absolut](#) dan [kemiskinan relatif](#). Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

[Bank Dunia](#) mendefinisikan [Kemiskinan absolut](#) sebagai hidup dg pendapatan dibawah [USD](#) \$1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah \$2 per hari, dg batasan ini maka diperkirakan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari \$1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari \$2/hari. Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan \$1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari \$1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Garis kemiskinan ditetapkan sebesar 1 Dollar AS/ kapita/ hari atau sekitar Rp 250.000/bulan. Jumlah ini lebih besar dari perhitungan dengan pendekatan yang didasarkan kebutuhan kalori di Indonesia.

- **Pendekatan ADB (Asean Development Bank)**

Asean development Bank menetapkan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS/Capita/hari atau sekitar Rp 350.000/bulan. Jumlah ini lebih besar dari perhitungan dengan pendekatan yang didasarkan kebutuhan kalori di Indonesia dan pendekatan yang dilakukan oleh bank dunia.

- **Pendekatan BPS**

Indonesia pada umumnya menggunakan pendekatan BPS dalam pengukuran tingkat kemiskinan. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin. Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Secara umum penduduk miskin dapat dibedakan menjadi dua yaitu miskin kronis (*chronic poor*) dan miskin sementara (*transient poor*). Miskin kronis adalah penduduk miskin yang berpenghasilan jauh di bawah garis kemiskinan dan biasanya tidak



memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ekonomi, sedangkan miskin sementara adalah penduduk miskin yang berada dekat garis kemiskinan.

Jika terjadi sedikit saja perbaikan dalam ekonomi, kondisi penduduk yang termasuk kategori miskin sementara ini bisa meningkat dan statusnya berubah menjadi penduduk tidak miskin.

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan pada pendekatan BPS adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

TABEL II
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, 2006-2007

PROPINSI	KABUPATEN	JML KEC	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000)		PERSENTASE PENDUDUK MISKIN		GARIS KEMISKINAN (Rp/Kap/Bulan)	
			2006	2007	2006	2007	2006	2007
Sumatera Utara	Kab. Karo	8	57,3	50,5	16,71	14,47	214589	223830
	Kab. Labuhan Batu	11	144,7	123,4	14,65	12,33	174094	184401
	Kab. Dairi	5	48,0	42,2	17,91	15,82	149554	154046
	Kab. Langkat	9	208,6	185,8	20,57	18,23	173890	186595
	Kab. Simalungun	20	144,7	124,4	17,2	14,84	161518	169699
Jambi	Muaro Jambi	5	25	21,9	8,47	7,13	133406	158962
	Merangin	12	38,9	34,2	14,05	12,10	165689	181158
Bengkulu	Kaur	5	41	44,5	38,55	38,18	137793	148526
	Rejang Lebong	5	42,0	42,6	17,36	16,38	165007	172551
	Muko Muko	10	27,9	28,7	21,19	20,06	166740	174677
	Lebong	7	16,4	16,7	18,91	18,08	147002	155040
Bangka Belitung	Bangka	6	30,2	25,2	11,78	10,53	197372	221655
	Belitung	4	17,0	14,2	12,59	11,59	232804	269924
	Bangka Selatan	7	13,5	9,6	8,86	6,71	194114	208921
Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	4	24,9	19,3	10,39	8,14	139356	155030
	Banjar	6	22,7	20,0	4,82	4,24	132029	142893
	Hulu Sungai Selatan	4	22,6	19,6	10,97	9,68	152307	166073
	Tanah Laut	4	23,9	19,8	9,18	7,62	159626	177557
	Tabalong	10	24,7	21,1	13,04	11,25	152152	171912
Kalimantan Barat	Sintang	4	69,3	66,2	19,8	17,10	154585	169606
	Kapuas Hulu	9	37,1	34,8	17,76	15,05	141617	140409
	Landak	6	87,0	86,3	27,82	24,95	126325	136398
Sulawesi Barat	Mamuju	10	33,9	30,4	11,96	10,43	118318	119031
	Mamuju Utara	8	10,9	9,2	11,04	9,22	164668	166638
Sulawesi Selatan	Jeneponto	5	82,5	81,1	25,06	24,55	132433	137626
	Sinjai	8	35,0	30,8	15,76	13,87	100030	106827
	Enrekang	4	42,6	41,9	23,18	22,79	131884	137249
	Bone	12	130,9	131,6	18,78	18,84	119395	127752
Nusa Tenggara Barat	Bima	10	112,3	108,1	27,40	25,12	136502	14801x
	Lombok Timur	5	292	282,1	27,74	25,6	150688	15650x
	Sumbawa	10	124,9	122,0	30,99	28,78	162769	17124x
	Sumbawa Barat	4	29,1	28,7	30,5	28,63	193913	21285x

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007, Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia



Pada tabel di atas, jumlah penduduk miskin terbanyak di kabupaten PNPM PISEW terdapat di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sedangkan jumlah penduduk miskin tersedikit terdapat di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Dari tahun 2006 ke tahun 2007 jumlah penduduk miskin pada umumnya cenderung berkurang, kecuali di beberapa kabupaten yakni Bone, Muko-muko, Kaur.

Persentase penduduk miskin terbanyak terdapat di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan persentase penduduk miskin tersedikit terdapat di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Persentase penduduk miskin ini menunjukkan perbandingan jumlah penduduk miskin dengan penduduk lain yang tidak miskin. Angka persentase penduduk miskin yang besar menunjukkan ketidakmerataan pendapatan berlebihan antara penduduk.

Garis kemiskinan menunjukkan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Di program PNPM PISEW, Kabupaten Sinjai memiliki garis kemiskinan yang paling rendah,

sedangkan Kabupaten Belitung memiliki garis kemiskinan yang paling tinggi.

Dengan konsep program PNPM PISEW yang tepat diharapkan tingkat kemiskinan yang terdapat di kabupaten KSK PNPM PISEW secara bertahap akan berkurang dari waktu ke waktu.

Tabel ini dapat digunakan sebagai angka dasar dalam melihat perubahan tingkat kemiskinan di kabupaten KSK PNPM PISEW di tahun selanjutnya.

Bagaimana konsep mengurangi kemiskinan yang manjur? Hal itulah yang menjadi tugas kita bersama untuk merumuskan dan melaksanakannya.